JURNAL MSDM
Manajemen Sumber Daya Manusia
ISSN : 0000 - 0000
Vol. 1, No. 2, 2024

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENCEGAH KENAKALAN REMAJA PADA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Syahrizal Helmi[1], Ni Made Musiyani Anjasmari[2], Sugianor[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail : helmisyahrizal414@gmail.com

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai permasalahan kurangnya petugas, kurangnya sumberdaya manusia yang tersedia dan banyaknya anak remaja atau anak sekolah yang melanggar aturan. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Indikator yang sudah baik adalah: Pertama, efesiensi, pelaksanaan program, efektivitas, kesesuaian dengan rencana, pencapaian hasil, kerjasama sudah baik. Sedangkan indikator yang belum baik adalah penyelesaian pekerjaan, pelaksanaan tugas kurang baik, terpenuhi da, konsisten. Faktor penghambat adalah anggaran APBD yang rendah, minimnya jumlah petugas dalam operasional kerjanya, Pendidikan petugas yang masih rendah, pelaksanaan tugas yang tidak terpenuhi dan wilayah operasional yang sangat luas. Faktor pendukung adalah sudah berjalannya efesiensi, sudah berjalannya efektivitas, kesesuaian rencana dalam penertiban, pencapaian hasil petugas dan adanya kerjasama. Disarankan kepada Bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya lebih menekankan kepada anggotanya yang bertugas agar mempelajari dan memahami serta melaksanakan tupoksinya dengan baik sehingga terpenuhi pelaksanaan tugasnya. petugas Pamong Praja agar lebih bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dalam pelaksanaan tugas yang dijalankan.

Kata Kunci : Kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

ABSTRACT

The Civil Service Police Unit has problems with a lack of officers, a lack of available human resources and a large number of teenagers or school children who violate the rules. This research method uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative type. The results of research on the Performance of the Civil Service Police Unit in Preventing Juvenile Delinquency in Amuntai Tengah District, North Hulu Sungai Regency are quite good. Good indicators are: First, efficiency, program implementation, effectiveness, conformity with plans, achievement of results, good cooperation. Meanwhile, indicators that are not good are completion of work, poor implementation of tasks, fulfillment and consistency. The inhibiting factors are the low APBD budget, the minimal number of officers in operational work, the low level of officer education, unfulfilled implementation of duties and the very large operational area. Supporting factors are efficiency, effectiveness, suitability of plans in controlling, achievement of results by officers and cooperation. It is recommended that the Head of the North Hulu Sungai Regency Civil Service Police Unit should place more emphasis on the members on duty to study, understand and carry out their main duties and tasks well so that they can fulfill their duties. Civil Service officers to cooperate more and communicate better in carrying out their duties.

Keywords*: Performance, Civil Service Police Unit and Fire Department.*

PENDAHULUAN

Satuan Polisi Pamong Praja juga diberikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat bahwa pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, kalaupun ada maka efektifnya ditangani oleh pihak kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini sudah diterapkan. Namun kenyataannya pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa dikatakan maksimal, karena hal ini ditandai oleh adanya pelanggaran Perda serta laporan, keluhan dan kritikan dari masyarakat tentang kurang efektifnya kinerja aparat Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain, banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu (Tjiptono, 2014).

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sekaligus pembinaan terhadap remaja atau anak didik/pelajar sehingga mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang yang membuat orang tua menjadi resah dan tentunya masyarakat juga terganggu dengan kenakalan-kenakalan yang diperbuat anak-anak remaja terkhusus anak didik/pelajar yang terjadi di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai aparatur pemerintah daerah dalam penegakan peraturan-peraturan daerah dan sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kenakalan remaja/anak didik/pelajar yang melakukan tindakan-tindakan penyimpangan bisa dibina dan diamankan dengan diberikan arahan-arahan dan pembinaan, masyarakat akan tentram, merasa aman dan tentunya tidak terganggu dan kota serta lingkungan menjadi lebih tertib (Malayu S.P. Hasibuan, 2016).

Permasalahan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya petugas yang belum mengikuti uji kompetensi dalam kemampuan sebagai pejabat fungsional sehingga tidak memahami tupoksinya sehingga menghambat kinerja mereka. Dimana masih ada beberapa petugas Satpol PP hanya memiliki pendidikan SLTA dan SLTP yang mana tidak memahami dalam tugas yang mereka lakukan (Setyawan, 2022).

Permasalahan kedua kurangnya sumberdaya manusia yang tersedia serta jumlah anggota dan anggaran operasional sehingga tidak konsisten dalam melaksanakan tugasnya dimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya hanya sekedar lewat memantau dilokasi saja tidak selalu konsisten mengatur dan menertibkan kenakalan remaja dengan benar, sementara wilayah operasional dalam melakukan penertiban sangat luas.

Permasalahan ketiga adalah anak usia remaja maupun pelajar adalah bolos sekolah. Mereka keluyuran di warung-warung kopi, cafe, warnet, ditempat-tempat kost/hiburan ataupun di lokasi pariwisata, yang sangat memprihatinkan disaat jam belajar sekolah. Sesuai tugas dan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja maka tim Satpol PP menyaring beberapa pelajar yang ditemukan sedang berada di lokasi pariwisata candi agung, café dan warnet.

Berdasarkan latar belakang pada masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara".

1) Produktivitas yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antar input dengan output.
2) Kualitas Layanan yaitu cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik terhadap kualitas.
3) Responsivitas yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
4) Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksana kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Oleh sebab itu responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan responsivitas.
5) Akuntabilitas yaitu menunjukan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan publik. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik (Dwiyanto, 2013).

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota (Setyawan, 2022).

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.

METODE

Penulis dalam penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari, Antasari, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan 71417, Indonesia.

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan

sistematis terkait dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, sumber data diambil melalui penarikan secara *purposive sampling* berjumlah 15 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, tringulasi, analisis kasus negatif dan mengadakan membercheck (Sugiyono, 2022).

PEMBAHASAN

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara
   a. Produktivitas

      Ukuran yang ditentukan untuk mengetahui seberapa baik kualitas sumber daya yang dimiliki, serta dimanfaatkan guna mendapatkan hasil yang optimal. Biasanya istilah produktivitas ini digunbakan dalam hal produksi industry atau diberlakukan pada para pegawai dan karyawan yang bekerja pada suatu instansi atau perusahaan

      1) Efesiensi

         Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat bahwa efesiensi sudah baik yang mana petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyesuanan program, pelaksanaan program yang direncanakan, pelaksanaan kebijakan terhadap peraturan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan serta pengawasan yang dilakukan dan hasilnya cukup baik karena semua dilaksanakan oleh petugas.

      2) Efektivitas

         Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa efektivitas yang mana pentaan dan penertiban remaja yang meresahkan masyrakat serta pelajar yang bolos sekolah cukup baik, dimana dalam penertiban yang dilakukan cukup meminimalissr para remaja yang nongkrong di warung-warung kopi, cafe, warnet, ditempat-tempat kost/hiburan ataupun di lokasi pariwisata pada saat jam sekolah.

   b. Kualitas Layanan

      Kualitas layanan adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Pelayanan dan pemberian dukungan kepada pelanggan serta kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan layanan dan dukungan dengan penuh komitmen.

      1) Penyelesaian pekerjaan

         Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pekerjaan masih belum semuanya tercapai, dimana target yang dilakukan belum terealisasi dengan baik, masih adanya remaja ataupun anak sekolah yang tidak taat dalam penertibannya, karena lokasi yang sangat luas anak sekolah ataupun remaja yang meresahkan masyarakat tidak terkontrol dalam penertibannya.

      2) Kesesuaian dengan rencana

         Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dengan rencana sudah baik yang mana penataan dan penertiban remaja dan anak sekolah yang keluyuran di warung-warung kopi, cafe, warnet, ditempat-tempat kost/hiburan ataupun di lokasi pariwisata petugas melakukan sesuai dengan rencana tugasnya.

c. Responsivitas

Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah untuk menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan serta mengembangkan program- program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

1) Pelaksanaan tugas

Hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas masih kurang baik yang mana masih ada beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memahami tupoksinya sehingga menghambat kinerja mereka. Ada beberapa petugas Satpol PP hanya memiliki Pendidikan SLTA.

2) Tanggung jawab

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab petugas masih kurang karena petugas hanya sekedar lewat memantau dilokasi saja tidak selalu konsisten mengatur dan menertibkan kenakalan remaja dengan benar, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak semuanya terlaksana.

d. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab , sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban per tanggung jawab yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.

1) Terpenuhi

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa terpenuhi masih kurang baik yang mana wilayah operasional dalam melakukan penertiban remaja ataupun anak sekolah sangat luas sehingga petugas Satopol PP masih kurang dalam pelaksanaannya dan tidak secara maksimal dalam tugas yang dilakukan.

2) Pencapaian hasil

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa pencapaian hasil cukup baik, yang mana selama ini petugas melakukan hasil yang baik dalam kinerjanya walupun ada beberapa yang masih belum paham dengan tupoksi tugasnya.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan.

1) Kerjasama

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kerjasama sudah baik, yang mana adanya himbauan kesetiap sekolah ataupun kepada masyarakat bahwa dalam kenakalan remaja yang harus dicegah.

2) Konsisten

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa konsisten masih kurang baik yang mana dalam penertiban kenakalan remaja yang tidak semua tempat dapat dipatroli karena wilayah yang sangat luas serta minimnya petugas yang ada.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Faktor Penghambat

1) Anggaran APBD yang Rendah

Kurangnya anggaran anggaran APBD sehingga mempengaruhi kinerja patugas dalam melakukan tugasnya dan petugas konsisten dalam melaksanakan tugasnya

2) Minimnya Jumlah Petugas dalam Operasional Kerjanya
Kurangnya jumlah petugas sehingga dalam bekerja petugas tidak langsung melakukan kewilayah operasional, hanya lewaau saja, dan terkadang karena wilayah operasional yang luas sehingga dalam pekerjaan yang dilakukan tidak konsisten dalam pelaksanaannya.
3) Pendidikan Petugas yang Rendah
Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi oleh satpol PP sehingga dalam pelaksanaan tugas masih kurang sehingga masih ada beberapa petugas Satpol PP hanya memiliki Pendidikan SLTA.
4) Pelaksanaan Tugas yang tidak Terpenuhi
Pelaksanaan tugas masih kurang baik yang mana sementara wilayah operasional dalam melakukan penertiban luas sehingga petugas Satopol PP masih kurang dalam pelaksanaannya tidak secara maksimal dalam kinerja yang dilakuakn dalam penertiban kenakalan remaja.
5) Wilayah Operasional yang Sangat Luas
Wilayah operasional yang luas sehingga dalam pekerjaan yang dilakukan tidak konsisten dalam pelaksanaannya.

b. Faktor Pendukung
1) Sudah Berjalannya Efesiensi
Petugas melakukan sesuai dengan tugasnya dalam penataan dan penertiban remaja dan anak sekolah. Petugas melakukan arahan langsung kepada remaja yang nongkrong pada jam malam yang meresahkan masyarakat sekitar.
2) Kesesuaian Rencana Penertiban
Petugas melakukan penataan dan penertiban remaja dan anak sekolah sesuai dengan SOP, baik secara langsung memberikan teguran ataupun himbauan kepada remaja yang melanggar aturan dan meresahkan bagi masyarakat
3) Sudah Berjalannya Efektivitas
Adanya jadwal petugas yang terjadwal dalam berpatroli, baik dari pagi siang dan malam hari, petugas melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah di atur dalam tugasnya.
4) Adanya Kerjasama Petugas
Kerjasama sudah baik, yang mana adanya himbauan kesetiap sekolah ataupun kepada masyarakat bahwa dalam kenakalan remaja yang harus dicegah.
5) Pencapaian Hasil Petugas
Pencapaian hasil cukup baik, yang mana selama ini petugas melakukan hasil yang baik dalam kinerjanya walupun ada beberapa yang masih belum paham dengan tupoksi tugasnya.

SIMPULAN

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mencegah Kenakalan Remaja pada Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik hal ini dapat dilihat dari 5 (lima) indikator yang sudah baik dan 5 (lima) indikator yang belum baik. Indikator yang sudah baik adalah: *Pertama*, efesiensi sudah baik yang mana petugas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penyesuanan program, pelaksanaan program yang direncanakan, pelaksanaan kebijakan terhadap peraturan, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan serta pengawasan yang dilakukan dan hasilnya cukup baik karena semua dilaksanakan oleh petugas. *Kedua*, efektivitas yang mana pentaan dan penertiban remaja yang meresahkan masyrakat serta pelajar yang bolos sekolah cukup baik, dimana dalam penertiban yang dilakukan cukup meminimalissr para remaja yang nongkrong di warung-warung kopi, cafe, warnet, ditempat-tempat

kost/hiburan ataupun di lokasi pariwisata pada saat jam sekolah. *Ketiga,* kesesuaian dengan rencana sudah baik yang mana petugas melakukan penataan dan penertiban remaja ataupun anak sekolah sesuai dengan rencana. *Keempat,* pencapaian hasil cukup baik, yang mana selama ini petugas melakukan hasil yang baik dalam kinerjanya walupun ada beberapa yang masih belum paham dengan tupoksi tugasnya. *Kelima,* kerjasama sudah baik, yang mana adanya himbauan kesetiap sekolah ataupun kepada masyarakat bahwa dalam kenakalan remaja yang harus dicegah. Sedangkan indikator yang belum baik adalah: *Pertama,* penyelesaian pekerjaan masih belum semuanya tercapai, dimana target yang dilakukan belum terealisasi dengan baik, masih adanya remaja ataupun anak sekolah yang tidak taat dalam penertibannya, karena lokasi yang sangat luas anak sekolah ataupun remaja yang meresahkan masyarakat tidak terkontrol dalam penertibannya. *Kedua,* pelaksanaan tugas kurang baik yang mana masih ada beberapa petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memahami tupoksinya. *Ketiga,* tanggung jawab kurang baik yang mana petugas tidak langsung melakukan kewilayah operasional, hanya lewat saja, *Keempat,* terpenuhi masih kurang baik yang mana wilayah operasional dalam melakukan penertiban remaja ataupun anak sekolah sangat luas. *Kelima,* konsisten kurang baik yang mana dalam penertiban kenakalan remaja yang tidak semua tempat dapat dipatroli karena wilayah yang sangat luas serta minimnya petugas. Faktor penghambat adalah anggaran APBD yang rendah, minimnya jumlah petugas dalam operasional kerjanya, Pendidikan petugas yang masih rendah, pelaksanaan tugas yang tidak terpenuhi dan wilayah operasional yang sangat luas. Faktor pendukung adalah sudah berjalannya efesiensi, sudah berjalannya efektivitas, kesesuaian rencana dalam penertiban, pencapaian hasil petugas dan adanya kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi, A. (2022) 'Kinerja Pegawai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pada Kantor Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 1–17.

Dwiyanto, A. (2013) *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta.

Malayu S.P. Hasibuan (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.

Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.

Setyawan (2022) 'Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima', . *Program Studi Politik Indonesia Terapan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat* [Preprint].

Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd edn. Edited by S.Y. Suryandari. Bandung: Alfabeta.

Tjiptono (2014) *Service Management Mewujudkan Layanan Prima*. Bandung: Alfabeta.

Trio, S. *et al.* (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.